



KESIAPAN INDONESIA MENJADI ANGGOTA TRANS-PACIFIC PARTNERSHIP

Humphrey Wangke*)

Abstrak

Indonesia berencana menjadi anggota blok perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP). TPP menjanjikan penghapusan tarif perdagangan dan investasi di antara negara-negara anggotanya dan karenanya akan membuat perekonomian menjadi lebih terbuka. Namun demikian, satu hal yang membedakan TPP dengan free trade arrangement (FTA) lainnya adalah TPP tidak mengenal hak-hak eksklusif BUMN.

Pendahuluan

Setelah lama mempertimbangkan, Presiden Joko Widodo akhirnya menyatakan Indonesia siap bergabung dalam *Trans-Pacific Partnership* (TPP). Komitmen Indonesia ini disampaikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama saat berkunjung ke AS tanggal 27 Oktober 2015. Ada dua pertimbangan Pemerintah Indonesia untuk bergabung dengan TPP. *Pertama*, perekonomian Indonesia sudah terbuka. *Kedua*, Indonesia merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara berkat produk domestik bruto senilai lebih US\$1 triliun, dan karenanya Indonesia dipercaya menjadi anggota kelompok 20 (G-20) negara-negara ekonomi utama dunia.

Organisasi kerja sama ekonomi TPP sebenarnya sudah lama direncanakan pembentukannya. Cikal bakal TPP

adalah *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement* beranggotakan Brunei, Chile, Selandia Baru, dan Singapura yang dibentuk tahun 2005. Pada tahun 2008, 8 negara lainnya menyatakan bergabung, yaitu Australia, Kanada, Jepang, Malaysia, Meksiko, Peru, AS, dan Vietnam. Pembentukan TPP disepakati oleh ke-12 negara itu pada tanggal 12 Oktober 2015.

Implementasi TPP memerlukan persetujuan parlemen masing-masing negara anggota. Karena itu, TPP diperkirakan baru akan terbentuk dua tahun lagi. Bahkan ada kemungkinan implementasi TPP akan lebih lama lagi karena ada pihak yang memperhitungkan bahwa TPP akan ditolak oleh Kongres AS bila diserahkan menjelang pemilu. Besar kemungkinan pemerintah AS akan meminta persetujuan Kongres AS pada pascapemilu 2016 mendatang.

*) Peneliti Utama Masalah-masalah Hubungan Internasional, pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. Email: dhanny_2000@yahoo.com



Jika terwujud, TPP akan menjadi organisasi perdagangan bebas regional terbesar di dunia karena mewakili 36,26 persen PDB dunia. TPP bertujuan untuk memperkecil hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota, menciptakan mekanisme penyelesaian masalah investasi, mempromosikan inovasi, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan serta menciptakan lapangan kerja. Namun konsekuensinya, praktik proteksionisme harus dihapuskan dan tidak ada keistimewaan bagi perusahaan milik negara (BUMN). Karena itu, menarik untuk dikaji kesiapan Indonesia bergabung dalam TPP.

Persaingan dengan Negara-Negara ASEAN

Indonesia pernah disebut sebagai "macan Asia" karena pertumbuhannya lebih dari tujuh persen per tahun pada 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Namun, kondisi tersebut tidak terjadi saat ini. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang dahulu di belakang Indonesia, sekarang memperlihatkan kinerja yang lebih baik.

Misalnya dalam menghadapi perekonomian Tiongkok yang mengalami perlambatan, ekspor Indonesia tertinggal dibandingkan dengan Vietnam, Malaysia, dan Thailand. Penyebab utamanya adalah ketiga negara ini mengeksport produk manufaktur atau konsumsi yang menjadi permintaan utama pasar Tiongkok. Suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh Indonesia.

Perekonomian Tiongkok saat ini mulai mengalami perubahan struktur dari semula bertumpu pada investasi menjadi konsumsi sehingga permintaan impor barang konsumsi Tiongkok meningkat. Hal inilah yang membuat kinerja ekspor Vietnam, Malaysia, dan Thailand membaik, sebaliknya membuat permintaan impor komoditas dari Indonesia menurun.

Indonesia menjadi "macan Asia" ketika industri manufaktur berkembang pesat, terutama tekstil dan alas kaki. Kondisi seperti ini yang ingin kembali dicapai Indonesia. Karena itu, pemerintah sedang memperbaiki regulasi untuk mendorong sektor manufaktur sebagaimana tercantum dalam paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan sejak September 2015. Beberapa paket kebijakan itu dimaksudkan

untuk menangani ketidakpastian global dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menjaga daya beli dan memberi insentif ke dunia usaha.

Paket kebijakan yang dikeluarkan itu diharapkan juga bisa mendorong penanaman investasi asing langsung (*foreign direct investment*/FDI), terutama dari Tiongkok, misalnya dengan memanfaatkan peralihan perekonomian Tiongkok dari investasi menjadi konsumsi. Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi FDI dari Tiongkok di Indonesia tergolong paling rendah. Sebagai perbandingan, realisasi investasi Jepang mencapai 70 persen dari nilai komitmen, Taiwan 40 persen, serta AS dan Eropa masih di atas 30 persen. Sementara itu, realisasi investasi Tiongkok hanya 10 persen.

Melihat kondisi itu, maka Indonesia harus memajukan industri manufaktur untuk meningkatkan ekspor barang konsumsi sebab kondisi global saat ini memberi tekanan bagi eksportir komoditas, terutama karena pelemahan permintaan yang utamanya dari Tiongkok. Kombinasi perlambatan ekonomi global dan penyeimbangan ekonomi di Tiongkok bukan kondisi yang baik bagi pasar komoditas Indonesia. Karena itu, Indonesia harus mencari pasar baru untuk ekspor komoditas. AS dan Eropa menjadi sasaran.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2015 ini diperkirakan hanya 4,7 persen sedangkan tahun 2016 akan meningkat menjadi 5,3 persen. Perkiraan pertumbuhan ini belum optimal bagi Indonesia. Jika pemerintah mampu memperbaiki kebijakan untuk mendorong industri manufaktur dan investasi, maka akan membantu Indonesia keluar dari tekanan ketidakpastian global. Bahkan, mendorong pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan seimbang.

Persyaratan TPP

Bagi AS, bergabungnya Indonesia ke dalam TPP menjadi kemenangan psikologis dalam menghadapi pengaruh ekonomi Tiongkok di kawasan Asia Pasifik. TPP memang merupakan salah satu elemen penting dari agenda kebijakan luar negeri Presiden Barack Obama untuk membangun kemitraan ekonomi dan perdagangan terbesar di kawasan Pasifik yang perjanjiannya di tandatangi pada awal Oktober 2015.

Vietnam menjadi ancaman besar bagi Indonesia karena bergerak lebih cepat dalam menjalin kesepakatan perdagangan internasional dengan Uni Eropa dan TPP. Dengan begitu, Vietnam lebih mudah mengakses pasar AS dan 10 negara lain anggota TPP serta negara-negara Eropa. Sementara posisi Indonesia belum jelas. Kesiapan Indonesia bergabung ke dalam TPP sebenarnya lebih ditujukan pada tercapainya penguatan *trade agreement* dengan Uni Eropa dan kemudian TPP agar tidak ketinggalan dengan negara-negara tetangga. Indonesia sudah melakukan perundingan dengan Uni Eropa terkait dengan pembentukan FTA. Jika sudah terjalin, maka TPP akan menyusul sebab mayoritas persyaratan dalam TPP sama dengan FTA Uni Eropa. Antara 80 sampai 85 persen syarat FTA Uni Eropa juga menjadi syarat TPP.

Indonesia sudah cukup banyak terlibat dalam perdagangan bebas regional. Sampai dengan tahun 2015, Indonesia sudah terlibat dalam 8 FTA dengan rincian 6 bersifat regional dan 2 bilateral. Ke-8 FTA tersebut adalah: 1. ASEAN *Free Trade Area* (FTA); 2. ASEAN, Australia and New Zealand FTA; 3. ASEAN-China FTA; 4. ASEAN-India FTA; 5. ASEAN-Japan FTA; 6. ASEAN-Korea FTA; 7. Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement*; 8. Indonesia-Pakistan FTA. Bagi Indonesia, manfaat penting yang bisa dirasakan dari keterlibatannya dalam FTA ada dua, yaitu: *pertama*, investasi yang meningkat walaupun dampak langsung perdagangan tidak bisa langsung dirasakan; dan *kedua*, mendorong reformasi domestik secara unilateral.

Terhadap TPP, Indonesia menghadapi persoalan yang lebih rumit. Tidak seperti kesepakatan perdagangan bebas lainnya, TPP mencakup bukan hanya perdagangan barang, jasa, dan investasi, tetapi juga aspek lainnya dari perdagangan, seperti penyelesaian sengketa dagang, perburuhan, dan lingkungan. Untuk sektor perdagangan barang, TPP menuntut penghapusan sekitar 11 ribu tarif dagang termasuk beberapa produk pertanian yang sensitif, seperti beras, gandum, gula, dan daging. Untuk sektor jasa, TPP mencakup sektor perbankan, asuransi, konstruksi, logistik, dan pariwisata. Untuk investasi, TPP mencakup repatriasi modal dan transfer modal, kompensasi yang jujur,

dan kandungan lokal (*local content*).

Meskipun bergabung dalam TPP merupakan kesempatan yang sangat baik, tetapi Indonesia tetap harus realistis mengingat Indonesia belum mempunyai produsen atau pengusaha yang kuat dalam kancah internasional. TPP mempersyaratkan adanya berbagai insentif seperti pajak dan fiskal, tetapi TPP tidak memberikan keistimewaan kepada BUMN. Tanpa persiapan matang, TPP bisa berdampak pada penerimaan negara. Pekerjaan rumah bagi Indonesia saat ini adalah mempelajari hal negatif jika bergabung dengan TPP.

Kesiapan Indonesia

Menurut Lili Yan Ing, seorang pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, ada tiga tantangan utama yang kemungkinan akan dihadapi Indonesia menghadapi TPP. *Pertama* adalah semua pengadaan barang oleh pemerintah dan proses yang dilalui harus transparan, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif. *Kedua* adalah kebutuhan pengaturan tenaga kerja. TPP memberikan kebebasan berserikat, berunding bersama, dan adanya undang-undang yang mengatur upah minimum. *Ketiga* menyangkut hak cipta dan paten. TPP dapat memberikan ekstensi untuk hak cipta dan paten termasuk paten pada obat-obatan yang mencegah pembuatan obat generik lebih mahal dari obat-obatan yang telah dipatenkan.

Bila memperhatikan kompleksitas persyaratan untuk menjadi anggota TPP, maka keinginan Presiden Joko Widodo agar Indonesia menjadi anggota TPP lebih untuk menjaga keseimbangan tata diplomasi Indonesia. Indonesia sejauh ini telah banyak menjalin kerjasama dengan Tiongkok yang merupakan rival berat AS saat ini. Penyampaian hasrat Indonesia untuk bergabung dalam TPP dapat dilihat dari konteks menjaga netralitas Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi mengatakan, Pemerintah Indonesia sebenarnya belum menentukan sikap resmi terhadap TPP karena masih ingin melihat detail perjanjiannya.

Pemerintah perlu bersikap hati-hati karena masih banyak yang harus dibenahi sebelum bergabung dalam kerja sama TPP. Komoditas ekspor Indonesia menurun nilai jualnya bukan karena akses pasar tetapi lebih

karena daya saing yang menurun akibat biaya produksi yang tinggi. Pada saat daya saing menurun, diversifikasi produk Indonesia yang memiliki keunggulan untuk ekspor tidak berkembang secara signifikan. Karena itu, hal yang terpenting bagi Indonesia saat ini justru menata kebijakan peningkatan daya saing untuk mengamankan daya saing dan ekspor. Jangan sampai Indonesia terlibat dalam *regional free trade area* yang justru hanya menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar negara lain, apalagi di dalam TPP Vietnam dan Malaysia mempunyai produk yang sama seperti Indonesia.

Perjanjian dagang dengan asing memang selalu menghadapkan Indonesia pada pilihan yang sulit. Di satu sisi kerja sama membuat Indonesia merugi. Tetapi kalau tidak terlibat di dalamnya, Indonesia akan tertinggal dan kehilangan pangsa pasar. Kerugian sudah dialami Indonesia dalam perjanjian dagang dengan Tiongkok yang telah berjalan setahun terakhir ini. Tiongkok mendapatkan keuntungan dua kali lipat dibandingkan Indonesia. Dampak buruk dari TPP adalah Indonesia akan dibanjiri oleh produk-produk pangan negara maju.

Bergabung dalam TPP membutuhkan pertimbangan, perencanaan, dan upaya konkrit yang matang. Salah satunya adalah penguatan sektor industri berbasis manufaktur yang saat ini struktur industrinya masih lemah. Saat ini industri nasional belum mampu menyediakan bahan baku dan penolong sehingga sangat bergantung pada impor. Di samping itu, biaya produksi masih tinggi karena energi, suku bunga bank, logistik, dan buruh yang kurang mendukung. Semua masalah ini bisa diatasi dengan melakukan investasi di sektor industri penyediaan bahan baku yang selama ini masih diimpor. Namun di sisi lain, TPP juga akan memberikan keuntungan berupa akses pasar yang semakin terbuka yang akan direbut Vietnam, Malaysia, dan Brunei jika Indonesia tidak menandatangani TPP.

Kesimpulan

Pemerintah Indonesia harus melakukan peninjauan secara menyeluruh mengenai kemungkinan menjadi anggota TPP mengingat ketatnya persyaratan yang harus dipenuhi. Dengan sejumlah perjanjian perdagangan bebas yang sudah dilakukan selama ini, belum banyak hasil yang diraih.

Indonesia dapat belajar dari *free trade* dengan Tiongkok yang kerugiannya lebih banyak dirasakan Indonesia. Karena itu, keinginan Indonesia menjadi anggota TPP lebih baik dilihat dari konteks keinginan Indonesia untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan AS mengingat selama ini Indonesia lebih banyak bekerja sama dengan Tiongkok. Artinya, belum tentu Indonesia menjadi anggota TPP jika memang tidak banyak keuntungan yang bisa dirasakan.

Sebagai catatan terakhir, keputusan untuk bergabung menjadi anggota TPP wajib melalui proses ratifikasi oleh parlemen. Agar memperoleh persetujuan DPR RI, Pemerintah Indonesia perlu menjelaskan urgensi Indonesia bergabung ke dalam TPP kepada anggota parlemen. Selain itu, DPR RI perlu pula mendorong agar keputusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang sungguh-sungguh terhadap kondisi Indonesia saat ini.

Referensi

- Abdullah Jailani, "Indonesia dan Traktat Kemitraan Strategis, Trans-Pasifik", *Kompas*, 15 Oktober 2015.
- "Daya Saing Kurang, Vietnam Semakin Mengancam", *Media Indonesia*, 11 Oktober 2015.
- "Iklim Investasi Membaik", *Kompas*, 29 Oktober 2015.
- "Jangan Buru-Buru Ikut TPP", *Media Indonesia*, 29 Oktober 2015.
- "Kemendag Teliti Manfaat TPP", *Kompas*, 29 Oktober 2015.
- "Kementan Klain Siap Sambut TPP", *Republika*, 29 Oktober 2015.
- "Keseimbangan Dinamis Asia", *Kompas*, 27 Oktober 2015.
- Lili Yan Ing, "Is Indonesia ready to join the Trans-Pacific Partnership", *The Jakarta Post*, 30 Oktober 2015.
- "Mau Ikut TPP, Daya Saing Produk RI Menurun", *Republika*, 29 Oktober 2015.
- "Pelaku Usaha Sambut Baik RI Ikut TPP", *Suara Pembaruan*, 28 Oktober 2015.
- "Proyeksi Perdagangan Global Tahun Ini Dipangkas", *Koran Tempo*, 2 Oktober 2015.
- "RI Masih Mencermati TPP", *Kompas*, 30 Oktober 2015.
- Rocky Intan, "Trans-Pacific Partnership: Indonesia's Lost Opportunity?", *The Jakarta Post*, 20 Oktober 2015.